

TESIS

**EKSISTENSI UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK) DALAM
PERKARA PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF PERADILAN AGAMA**



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

2018

EKSISTENSI UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK) DALAM PERKARA PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF PERADILAN AGAMA
JEFRI ANDRIES, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas,
133 halaman, 2017

ABSTRAK

Ketentuan tentang perceraian yang telah diputus di Peradilan Agama masih memiliki upaya hukum terkait putusan Pengadilan Agama. Salah satunya terkait upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung sebagai Peradilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali dengan maksud untuk memberikan kesempatan yang terakhir kalinya kepada masyarakat guna mencari sebuah keadilan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada pelaksanaannya diajukan oleh permohonan peninjauan kembali apabila ada kesalahan-kesalahan dalam proses pemeriksaan dan adanya bukti baru setelah pelaksanaan putusan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu : 1. Apasaja alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima dan ditolak. 2. Akibat hukum dari upaya hukum peninjauan yang diterima dan ditolak 3. Eksistensi upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara perceraian menurut perspektif Peradilan Agama. Penelitian hukum ini merupakan penelitian *yuridis normatif* dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan perinjauan kembali yang terakhir setelah pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diperiksa kembali apabila terjadi kesalahan-kesalahan dalam proses pemeriksaan dan terdapat bukti baru (*novum*) yang pada saat pemeriksaan tidak ditemukan. Hal yang demikian terjadi dalam perkara perceraian yang permohonan peninjauan kembalinya dikabul dalam perkara Nomor. 54/PK/AG/2008. Upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) ini tidak akan menangguhkan atau menghalangi pelaksanaan putusan (eksekusi). Pelaksanaan eksekusi tetap dilaksanakan meskipun yang dirugikan mengajukan permohonan peninjauan kembali. Dikabulkan permohonan peninjauan kembali dalam perkara perceraian menimbulkan permasalahan hukum serta keadaan sulit apabila termohon peninjauan kembali telah menikah lagi dengan orang lain. Hal yang demikian akan menyulitkan eksekusi putusan peninjauan kembali dan menimbulkan seorang suami memiliki istri dua orang atau sebaliknya. Permasalahan yang terjadi akan mempengaruhi ketentuan hukum terkait perceraian dan menimbulkan dampak perceraian secara hukum islam dibatalkan dengan putusan peninjauan kembali. Upaya hukum Peninjauan Kembali dalam perkara perceraian tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan Hukum Islam. Permohonan peninjauan dengan akibat hukum dari perceraian seperti nafkah Iddah, mut'ah, hadanah dan harta bersama seperti dalam perkara 38/PK/AG/2016 masih bisa dilaksanakan karena bisa mengembalikan hak-hak pemohon.

Kata kunci : Upaya hukum peninjauan kembali, perceraian,Peradilan Agama

THE EXISTENCES OF JUDICIAL REVIEW EFFORT (PK) IN DIVORCE CASE ACCORDING TO THE PERSPECTIVE OF RELIGIOUS COURTS.
JEFRI ANDRIES, Post graduated of Law Faculty in Andalas University, 133

pages, 2017

ABSTRACT

The provisions of divorce that has been disconnected in the religious courts still have legal remedies relating to religious court decisions. One of them is related to the extraordinary remedy law regulated in law No. 14 year 1985, the Supreme Court of Justice as the highest of all State Environmental review and Judicial Review application with the intention to give the last chance to the public to seek a justice of verdicts that have permanent legal force. The implementation is submitted by a review request, if there are errors in the review process and the existence of new evidence after the execution of the decision. The issues discussed in this study are: 1. What are the reasons for the review received and rejected. 2. Legal consequences of judicial review effort to review accepted and rejected 3. The existence of judicial review efforts in divorce cases according to Religious Judicature perspective. This legal research is a normative juridical research with conceptual approach, legislation, and case approach. The results of the study indicate that the last re-review request after the enforcement of a verdict that has been still in full force may be re-examined in case of errors in the examination process and there is new evidence (novum) which at the time of examination was not found. This is happened in a divorce case which judicial review effort was acceptant in the case number. 54/PK/AG/2008. Extraordinary remedies (review) this will not suspend or hinder the execution of the verdict (execution). Fixed execution was carried out despite the victim apply for a review. Granted the petition for review in the case of divorce raises the problem of the law as well as the predicament if the respondent review has remarried to other people. Such things will complicate the execution verdict review and raises a husband has two wives or otherwise. Problems occurred shall affect the provisions of the law of divorce and related impacts of divorce in Islamic law was cancelled by the decision of a review. The efforts of the Law Review in the case of divorce should not be done because it is contrary to the provisions of the applicable legislation, contrary to Islamic law. Petition for review with the legal consequences of a divorce as a living She, *mut'ah, hadanah* and cooperation property as in the case of 38/PK/AG/2016 could still be carried out because it can restore the rights of the applicant.

Key words : *judicial reviews effort, divorce, religious courts*